

Peran Media dalam Agenda Setting dalam Permasalahan Transportasi di Jakarta

Oleh:
Putu Nomy Yasintha*)

Abstrak

Media memiliki peran penting dalam proses penentuan agenda kebijakan. Beberapa ahli percaya bahwa media memiliki peran dalam menetapkan isu dan mengubahnya menjadi sebuah agenda. Dalam paper ini penulis ingin menjelaskan apa peran media dalam proses agenda setting, bagaimana media merubah suatu isu menjadi agenda dan bagaimana media dalam teori agenda setting dalam menjelaskan fenomena transportasi di Jakarta.

Kata kunci: Media, Agenda Setting, Transportasi di Jakarta

Abstract

Media has a certain role in the agenda setting process. Some believe media plays a role in making issues turning into agenda. In this paper I would like to explain what the role of media in the agenda setting process is, how media turns an issue into agenda, and I try to explain media in the agenda setting theory in the way to explain the transportation policy in Jakarta.

Keyword: Media, Agenda Setting, Transportation in Jakarta

Pendahuluan

Sebuah negara selalu memiliki beberapa isu kompleks yang saling terkait. Beberapa isu atau masalah yang terjadi mendapat beberapa perhatian lebih dari pemerintah dibandingkan isu lainnya. Dalam kata lain, beberapa isu yang terjadi kemudian diangkat menjadi agenda bagi pemerintah. Howlet, Ramesh dan Perl (2009) menjelaskan bahwa setiap isu ini berasal dari berbagai hal dan harus diawasi secara ketat dan seksama sebelum bisa dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah untuk dicarikan pemecahannya.

Dari bebagai banyak isu atau masalah, bagaimana sebuah isu bisa menjadi bagian dari agenda pemerintah? Berdasarkan pendapat dari Puerites (2007) beberapa isu sukses berubah menjadi agenda tergantung dari apakah isu tersebut kritikal atau tidak, saat sebuah isu mengandung informasi atau

bukti yang berasal dari proses evaluasi sebelumnya dan berdasarkan juga kepada keadaan kini yang menyatakan bahwa situasi tersebut membutuhkan perhatian, perlu diperhatikan juga apakah isu tersebut merupakan aksi kolektif dari group kepentingan, dan merupakan pergerakan sosial sebagai akibat dari beberapa topik atau isu khusus dan apakah isu tersebut merupakan bagian dari peran media.

Agenda setting merupakan salah satu langkah dalam alur kebijakan. Pada tahap ini pemerintah lebih fokus kepada beberapa isu yang bagi pemerintah merupakan isu yang kritis. Apa yang terjadi pada tahap awal dalam proses kebijakan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalannya alur kebijakan (policy cycle) and hasil yang dikeluarkan (Howlet, Ramesh, & Perl, 2009, hal 92). John Kingdon menjelaskan agenda sebagai (Howlett & Ramesh, 2003, hal120) daftar

subjek atau masalah yang mendapat perhatian serius dalam kurun waktu tertentu dari pejabat pemerintah dan orang-orang terkait yang berada di luar pemerintah. Proses pengaturan agenda merupakan proses mempersempit seperangkat subjek yang bisa dipikirkan ke titik yang sebenarnya menjadi fokus perhatian.

John Kingdon menekankan bahwa pembentukan gagasan kebijakan dan manipulasi jendela peluang (*windows of opportunity*) dibuat oleh pembuat kebijakan selama beberapa tahun. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa Studi tentang penetapan agenda mengakui kompleksitas pembentukan kebijakan pada umumnya. Secara khusus, interaksi tiga aliran yang berbeda - masalah, kebijakan, dan politik - yang berkumpul pada saat-saat kritis untuk menciptakan "jendela peluang" yang menghasilkan isu-isu yang menggerakkan "agenda keputusan", untuk pemberlakuan legislatif (Eutis, 2000).

John Kingdon (Eutis, 2000, 21) memisahkan proses penetapan agenda menjadi tiga aliran (masalah, kebijakan, dan politik) dan menganalisis kondisi di mana ketiganya berkumpul. Menurut Kingdon, pembuat kebijakan menyadari masalah, menyarankan solusi dan terlibat dalam aktivitas politik yang menentang atau mempromosikan perubahan kebijakan. Konvergensi ketiga aliran tersebut mendorong isu ke arah prioritas program yang lebih tinggi dan agenda keputusan, yang seringkali sebagai hasil arus politik. Jika peserta tidak dapat atau tidak memanfaatkan kesempatan semacam itu, mereka harus menunggu waktu sampai jendela kebijakan berikutnya terbuka. Terlepas dari bagaimana pembuat kebijakan mengenali masalah dan kemudian menguraikan kebijakan yang sesuai dengan masalah, media memegang

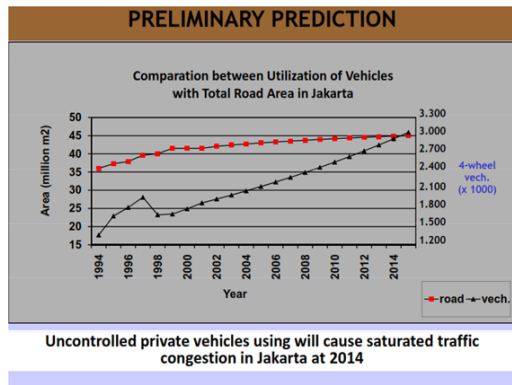
peran penting juga untuk membawa masalah ke permukaan.

Cohen (1963) menjelaskan ketika media menekankan topik; Audiens / penerima pesan publik akan menganggap topik ini penting (Walgrave, S dan Aelst PV 2006, hal.89). Para ahli politik menjelaskan bagaimana aktor politik (pemerintah, parlemen, partai politik, dll) menemukan prioritas mereka, memberi perhatian atau mengabaikan masalah, dan melakukan, atau tidak, menyunting keputusan atau pendirian topik yang diangkat media ini (Baumgartner & Jones, 1993 dalam Walgrave et al, 2006).

Sistem Transportasi di Jakarta

Jumlah mobil dan motor yang terdaftar di DKI Jakarta meningkat setiap tahunnya. Karena jumlah urbanisasi semakin meningkat di Jakarta, kekhawatiran pemerintah akan kendaraan juga meningkat. Jika banyak warga menggunakan moda transportasi pribadi maka akan meningkatkan kemacetan lalu lintas dan polusi.

Menurut Polda Metro Jaya, jumlah sepeda motor yang terdaftar meningkat 60 persen dari 1,5 juta pada tahun 1998 menjadi 2,4 juta pada tahun 2002. Sementara, mobil pribadi juga meningkat dari sekitar 1 juta di tahun 1998 menjadi 1,4 Juta pada tahun 2002 (Asri, 2008). Di sisi lain, panjang jalan total 7.650 km dengan luas jalan adalah 40,1 km² atau hanya 6,2% dari luas wilayah kota (Pemda DKI Jakarta, tidak ada tahun). Ada perbedaan besar antara pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan panjang jalan. Beberapa ahli memprediksi akan ada situasi yang tidak terkendali pada 2014 yang menyebabkan kemacetan lalu lintas besar. Hal ini ditunjukkan pada gambar 1.



Sumber: Pemerintah Kota Jakarta

Dari gambar 1 kita dapat melihat bagaimana ketidakseimbangan jumlah pertumbuhan antara pertumbuhan panjang jalan dan pertumbuhan kendaraan di Jakarta. Di beberapa titik akan ada jumlah kendaraan yang lebih banyak dibandingkan dengan panjang jalan itu sendiri dan kemacetan lalu lintas tidak akan terhindarkan lagi. Jaringan jalan tidak mencukupi untuk memenuhi peningkatan kebutuhan kendaraan dan angkutan umum. Selain kemacetan lalu lintas, tingginya jumlah kendaraan di Jakarta juga menyebabkan masalah lainnya. Berdasarkan wilayah Jakarta ada Rp. 17,2 miliar hilang setiap tahun karena kemacetan lalu lintas yang menyebabkan masyarakat kehilangan waktu, bahan bakar, dan biaya kesehatan (Asri, 2008). Kemacetan lalu lintas di Jakarta juga disebabkan oleh angkutan umum yang terbatas. Dibandingkan kendaraan pribadi, pertumbuhan angkutan umum masih rendah. Ini juga alasan kendaraan pribadi masih mendominasi lalu lintas di Jakarta.

1. Kebijakan Transportasi Di Jakarta

Berdasarkan permasalahan yang terus berlanjut yang dihadapi Pemprov DKI, mereka mengikuti rencana induk transportasi Jakarta yang terbagi dalam beberapa rencana khusus.

- Pengembangan Angkutan Umum
Strategi ini mengembangkan empat moda transportasi yang terdiri dari:

1. MRT/Subway

Moda transportasi ini belum bisa berlaku penuh di Jakarta karena beberapa



Sumber: Pemerintah Kota Jakarta

masalah dan belum selesainya kesepakatan dengan pihak swasta pengembang. Cara transportasi ini dibiayai dengan pinjaman pemerintah Jepang melalui JBIC (Loan No. IP-536, November 2006).

Proyek ini berjalan lambat karena pemerintah perlu menempuh proses yang panjang dalam administrasi dan membuat kesepakatan dengan banyak institusi. Beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam proyek ini seperti, Amandemen Perjanjian Pinjaman diproses sebagai dasar hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan mengenai penggunaan dana yang dipinjamkan oleh Pemerintah Pusat sebagai hibah kepada Pemprov DKI dan Desain Teknik Terperinci (DED) Konsultan perencanaan tender sedang diproses oleh Departemen Perhubungan (Jaya Raya, 2011). Sejak pemerintahan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta moda subway sudah mulai dikaji ulang kembali dan dikembangkan kedepannya.

2. LRT/Monorail

Monorel telah dimulai pada tahap konstruksi. Rute monorail rencananya akan diintegrasikan dengan koridor Busway di masa depan. Namun permulaan Krisis Ekonomi Asia pada tahun 1997 menunda proyek tersebut. Pada tahun 1999 proyek ini dihidupkan kembali dengan studi desain dasar yang direvisi yang bertujuan untuk memotong biaya modal. Proyek ini diharapkan menjadi sistem transportasi umum modern pertama di Jakarta, yang secara signifikan akan meningkatkan patronase angkutan umum yang pada gilirannya akan mengurangi kemacetan lalu lintas (Susilo et al, 2007).

3. BRT/Busway

Busway adalah salah satu moda transportasi yang baru saja digunakan di Jakarta. Pemerintah berhasil menerapkan kebijakan ini. Meski baru beroperasi sejak 2004, sudah dianggap sukses. Busway biasanya adalah koridor jalan bus di jalur terpisah. Busway sendiri mencoba menampung penumpang dengan kendaraan umum yang nyaman dan mencoba mengganti sistem bus lama yang sekarang berjalan di Jakarta. Sebuah survei yang dilakukan oleh Indonesian Consumer Foundation menunjukkan adanya pergeseran dari mobil pribadi ke pengguna Busway sebanyak 10,34% dan pergeseran dari sepeda motor itu sendiri mencapai 24,94% (Jaya Raya, 2011).

Meski sukses dengan Busway ada beberapa masalah seperti tidak memadainya jaringan SPBU. Busway membutuhkan pompa bensin khusus karena ukuran Busway itu sendiri dan memerlukan mesin khusus untuk masuk. Masalah lainnya adalah pengembangan sistem bus pengumpan akan memakan waktu karena kebutuhan untuk merestrukturisasi rute yang ada.

4. Waterways

Jalan air adalah moda transportasi yang diadopsi dari kota-kota besar seperti Venesia atau Belanda. Cara transportasi ini masih belum berjalan efektif di Jakarta karena situasi di sungai Jakarta yang penuh dengan sampah dan beberapa bahkan kering di musim panas.

Setelah pembersihan sungai-sungai di Jakarta di galakkan belakangan ini, moda transportasi ini diharapkan bisa di kembangkan. Sungai-sungai Jakarta memiliki potensi untuk moda transportasi ini hanya saja masih perlu dikaji lebih dalam mengenai penentuan rute alurnya.

▪ Pengendalian Lalu Lintas

Dalam strategi kedua ini pemerintah mencoba mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang bergerak di jalan. Sistem '3 in 1' diterapkan dimana di beberapa jalan utama dalam waktu tersibuk hanya mobil dengan minimal 3 orang di dalamnya akan diizinkan melewatinya. Strategi ini juga mencakup sistem penentuan harga jalan yang saat ini masih dalam penelitian. Untuk mengurangi lalu lintas, pemerintah juga menerapkan pembatasan parkir dengan mekanisme tarif khusus dimana beberapa daerah dengan lalu lintas tersibuk lebih mahal daripada di daerah lain. Tindakan terakhir dalam strategi ini adalah membangun lebih banyak fasilitas *park and ride* untuk mendukung penggunaan transportasi umum.

▪ Peningkatan Kapasitas Jaringan

Dalam strategi terakhir ini, pemerintah mencoba untuk menjaga lalu lintas dengan membangun integrasi *Area Traffic Control System (ATCS)* dan *Traffic Light Control* untuk meningkatkan Kapasitas Jaringan Jalan (perbaikan sistem saat ini). Pemerintah juga memperbaiki jalan dan

pembangunan *flyover* and terowongan, jalan tol juga sarana pejalan kaki.

Agenda Setting dalam Menjelaskan Kebijakan Transportasi di Jakarta

Berbagai masalah transportasi di kota, seperti: kemacetan lalu lintas, pelayanan dan angkutan umum yang masih belum memenuhi harapan masyarakat, masalah tarif angkutan umum yang sering kontradiktif, tingkat pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang relatif tinggi. Dari pengguna jalan tidak tertib / tidak disiplin, masalah parkir kendaraan yang tidak memadai dan tidak tertib, penggunaan jalan yang tidak semestinya ke tempat parkir dan pedagang kaki lima, masalah aksesibilitas untuk orang-orang penyandang cacat dan masalah transportasi lainnya. Banyak isu yang saling berkorelasi; Menyebabkan masalah transportasi Jakarta semakin kompleks.

Ketika sampai pada situasi transportasi di Jakarta dan bagaimana pemerintah akhirnya menguraikan kebijakan untuk menangani masalah transportasi, hal itu berkaitan dengan peran media dalam memberikan berita kepada masyarakat.

Media yang berupa surat kabar atau televisi selalu muncul dengan isu transportasi. Hal itu membuat masyarakat lebih memperhatikan isu ini. Tankard et all (1991, 3 dalam Weaver, 2006, hal.143) telah menggambarkan sebuah kerangka media sebagai "gagasan pengorganisasian pusat untuk konten berita yang memasok konteks dan menunjukkan apa masalahnya melalui penggunaan pilihan, menekankan pengecualian, dan elaborasi".

Media sering membahas tentang bagaimana sistem transportasi di Jakarta tidak efektif. Media menjelaskan bagaimana kegagalan sistem transportasi di Jakarta yang membawa kemacetan lalu lintas bisa menimbulkan masalah lain dalam ekonomi, kesehatan dan psikologi. Karena media fokus membagikan berita ke publik, pemerintah mulai memperhatikan isu tersebut.

Media sering membahas tentang isu kritis dengan para pemangku kepentingan. Berdasarkan beberapa ilmuwan ahli ada beberapa isu yang menjadi agenda saat media berperan di dalamnya.

Gambar 3**Agenda Politik Media Massa dalam Menetapkan Kekuasaan**

	Walke r (1977)	Gilberg et al. (1980)	Light (1982)	Cook et al (1983)	Kingdon (1984)	Protess et al. (1987)	Cook & Skogan (1991)	Protess et al (1991)	Pritehar d (1993)	Wanta & Foote (1994)
Issues	Car safety, Coal mine health, health act	Jobs, Energy, defence, peace, human right, taxes, middle east, panama canal	Not specified	Health fraud	23 cases (health + transport)	Toxic waste	Crime against the elderly	Police violence, children rights, dialysis scandal	Crime	12 domesti c and 3 internati onal issues
Media agenda	New York times	Newspaper (2), TV news (3)	Not specified	NBC, news, magazine	Not specified	TV5 (Chicago)	New York times	Local NBC (Chicago), CBS local newspaper	Local media (7)	TV news (3)
Political agenda	Senate	President	President	Government, interest elites, senate, budget, legislation, regulatory measures	Not specified	Policy elites, budget, legislation, regulatory, measures	Public spending, congress	Policy elites, regulatory measures	Public spendin g	Presiden t
Method	Time series	Cross sectional	Interview s	Field experiment	Interviews	Field experiment	Time series	Field experiment	Time series	Time series
Place	United states	United states	United states	United states	United states	United states	United states	Unite states	United states	United states
Media's impact	No impact	Strong impact	Hardly impact	Considerable impact	Hardly impact	Considerable impact	Considera ble impact	Strong impact	Weak impact	Weak impact

Sumber: S. Walgrave & P. Van Aelst, 2006, hal.90

Berdasarkan model ini kita bisa menjelaskan bagaimana media berhasil membawa masalah transportasi di Jakarta menjadi agenda rutin. Agenda media dalam hal ini tidak hanya dengan berita TV (TV One, Metro TV) tapi juga surat kabar lokal dan nasional (Tempo, Kompas). Agenda politiknya adalah Gubernur DKI Jakarta, elit legislatif, dan presiden. Pada bulan Juni 2012, Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya mengajukan Gugatan Warga kepada pemerintah kota, dewan kota dan Presiden melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) karena tidak dapat menangani situasi lalu lintas di ibu kota yang memberikan dampak sangat besar kepada Warga Jakarta (Green Radio, 2012).

Setiap 5 tahun di pemilihan gubernur DKI Jakarta, masalah lalu lintas selalu menjadi agenda. Isu ini selalu dibawa oleh kandidat baru yang datang dengan solusi baru untuk masalah yang sama. Mereka mencoba menawarkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah lalu lintas, sekaligus untuk menarik minat masyarakat dalam memilih mereka. Pada 2012 pemilihan gubernur terpilih baru Jokowi mencoba datang dengan solusi baru, saingannya adalah gubernur sebelumnya Fauzi Bowo. Metode yang digunakan oleh media untuk membuat isu ini lebih penting adalah selalu mengemukakan masalah ini ke permukaan dalam setiap wawancara dengan pemangku kepentingan.

Pengaruh agenda media berita tidak terbatas pada langkah pertama ini untuk memusatkan perhatian publik pada topik tertentu. Media juga mempengaruhi langkah selanjutnya dalam proses komunikasi, pemahaman dan perspektif kita pada topik dalam berita. Jika Anda memikirkan agenda secara abstrak, potensi pandangan media yang lebih luas terhadap opini publik menjadi sangat jelas. Secara abstrak, item yang mendefinisikan agenda

adalah objek. Untuk semua agenda yang telah kita diskusikan, objek adalah isu publik, tapi bisa jadi item atau topik lain, seperti agenda kandidat politik saat pemilihan. Objek adalah hal-hal yang perhatian media dan masyarakat terfokus (McCombs, no year, p.5)

Dampak media tetap terjaga sampai sekarang. Diskusi tentang masalah lalu lintas menjadi agenda utama setiap rencana gubernur Jakarta. Karena media menyoroti media dalam masalah ini, pemerintah benar-benar menganggap masalah kolektif ini perlu ditangani sesegera mungkin. Harapan publik terhadap tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini juga meningkat.

Kesimpulan

Media dalam setting agenda memiliki implikasi yang signifikan untuk menciptakan apa yang ada dalam pikiran orang. Media secara efektif mengubah sebuah isu menjadi agenda utama. Pemerintah lebih memperhatikan isu tertentu yang terkena media dan masyarakat. Media membantu masalah muncul di permukaan dan menjadi perhatian tapi tidak ada yang tahu sampai kapan isu pasti akan tetap menjadi agenda dan untuk berapa lama.

Pengaturan Agenda membantu menjelaskan metamorfosis dari isu ke dalam agenda, dan media memiliki peran di dalamnya. Tapi pengaturan Agenda tidak benar-benar menjelaskan kontinuitas suatu agenda. Media dalam pengaturan agenda menimbulkan masalah sehingga menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat umum, namun media sebagian besar fokus pada masalah ini namun tidak menjadi solusi. Sepertinya media menyampaikan masalah ini kepada pemerintah dan membiarkan pemerintah menemukan solusinya pada isu tertentu. Terlepas dari

semua itu, gambaran yang ditangkap oleh media memiliki implikasi besar tentang

bagaimana pemerintah perlu mengambil tindakan terhadap isu tersebut.

Daftar Pustaka

Asri, DU and Hidayat, B (2005) 'Current Transportation Issues in Jakarta and Its Impacts on Environment' Eastern Asia Society for Transportation Studies. Vol 5. pp 1792-1798. Easts [online] diunduh dari: http://www.easts.info/on-line/proceedings_05/1792.pdf (diakses pada: 27 Juni 2017)

Eustis, J.D. (2000) *Agenda-Setting: The Universal Service Case*. PhD Thesis. Viginia Polytechnic Institute and Staate University, Virginia [online] Diunduh dari: <http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04182000-13220003/unrestricted/jdeCOMPLETEetd.pdf> (Diakses pada: 27 Juni 2017)

Green Radio. (2012) *Pemprov DKI, DPRD dan Presiden Digugat Karena Macet*, Diunduh dari: <http://www.greenradio.fm/news/latest/8117-pemprov-dki-dpr-dan-presiden-digugat-karena-macet> (Diakses pada: 27 Juni 2017)

Howlett, M and Ramesh, M (2003) *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. 2nd Ed.* Canada: Oxford University Press

Howlet, M, Ramesh, M and Perl, A (2009) *Studying Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. 3rd Ed.* Canada: Oxford University Press

Jakarta Local Government (no year) 'Jakarta Urban Transport problems and Their Environmental Impacts'. *International Climate Change Workshop on Research Priorities and Policy Development*. Universitas Indonesia, Jakarta. Diunduh dari: <http://www.ui.ac.id/download/apru-awi/jakarta-local-government.pdf> (Diakses pada: 27 Juni 2017)

Jaya Raya. (2011) Transportation in Jakarta. [online] Diunduh dari: http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CFYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.asianhumannet.org%2Fdb%2Fdatas%2F9_transport%2Ftransport_jakarta_en.pdf&ei=MCzmUJiUJKac0AXck4A4&usg=AFQjCNGOz3UyABqnyufOSlwJcj51Ay5LEQ&sig2=eHYBULDXxRqeJSA6R2EeiQ&bvm=bv.1355534169,d.d2k (Diakses pada: 27 Juni 2017)

McCombs, M (no year) 'The Agenda Setting Role of Mass Media in The Shaping Public Opinion' [online] Diunduh dari: http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf (Diakses pada: 25 Juni 2017)

Mochtar , MZ and Hino, Y (2006) 'Principal Issues to Improve the Urban Transport Problems in Jakarta' *Osaka City University Research*, 47, September [online] Diunduh dari: http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/kiyo/DBf0470006.pdf (Diakses pada: 25 Juni 2017)

- Puerites, C. (2007) *Policy Analysis and Decision Making wih Emphasis on Chronic Non-communicable Diseases* [Seminar in Bridgetown Barbados]. 15-17 October.
- Susantono, B (1998) 'Transportation Land Use Dynamics in Metropolitan Jakarta' *Barkeley Planing Journal*, 12(1) [online] Diunduh dari: <http://escholarship.org/uc/item/2g41499w#page-1> (Diakses pada: 27 Juni 2017)
- Susilo, Y and Joewono , T (2007) *A Reflection of Motorization and Public Transport in Jakarta Metropolitan Arena* [online] Diunduh dari: <http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iatss.or.jp%2Fpdf%2Fresearch%2F31%2F31-1-06.pdf&ei=avrmUJPJCoa1AWz2oH4Bw&usg=AFQjCNErLzCHIIDIF8FuG1Tn2ErW-frDIA&sig2=SMLvTGWCUt1Fw2rE0GS-JQ&bvm=bv.1355534169,d.d2k> (Diakses pada: 27 Juni 2017)
- Walgrave, S and Aelst PV (2006) 'The Contingency of the Mass Media's Political Agenda Setting Power: Toward a Preliminary Theory' *Journal of Communication* ISSN 0021-9916 [online] DOI: 10.1111/j.1460-2466.00005.x (Diakses pada: 27 December 2012)
- Weaver, D (2006) 'Through on Agenda Setting, Framing and Priming' *Journal of Communication* ISSN 0021-9916 [online] DOI:10.1111/j.1460-2466.2006.00333.x (Diakses pada: 27 Juni 2017)

